

MEKANISME TATA KELOLA KORPORAT DAN PEREKAYASAAN LABA DI PERBANKAN PUBLIK INDONESIA

Alwan Sri Kustono
Universitas Jember

Abstract

The study examines the role of the institutional ownership, managerial ownership, board of directors, and the audit committee in preventing earnings management. All of independent variable associated with reduced levels of discretionary current accruals.

They are associated with firms that have smaller discretionary current accruals. We conclude that institutional ownership, managerial ownership, board and audit committee activity may be important factors in constraining the propensity of managers to engage in earnings management.

Key words: institutional ownership, managerial ownership, board of directors, the audit committee, earning management

Pendahuluan

Perbankan Indonesia merupakan lembaga keuangan yang mengelola dana paling besar dibandingkan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal atau asuransi. Dominasi perbankan dalam kapitalisasi dana masyarakat mencapai 67%, lebih tinggi dari pasar modal yang hanya 30% dan pasar obligasi korporasi sebesar 3%. Jumlah dana masyarakat atau dana pihak ketiga yang dikelola oleh industri perbankan nasional pada akhir tahun 2008 adalah 1.754 triliun atau naik 16% dari periode yang sama tahun 2007. Sebanyak 47% dari dana tersebut dalam bentuk deposito sisanya pada giro (24.5%) dan tabungan (28%). Nilai kapitalisasi pasar untuk saham akhir 2008 adalah Rp 1.065, 36 triliun. Obligasi korporasi akhir tahun 2008 adalah Rp 40 triliun dengan yang diperdagangkan mencapai Rp 10 triliun.

Dana yang dikelola perbankan besarnya lebih dari dua kali APBN 2008 yang mencapai sekitar Rp. 900 triliun. Tingginya kepercayaan terhadap industri perbankan untuk mengelola dana masyarakat menuntut adanya pengelolaan keuangan perbankan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pada November 1997, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan diciderai dengan dibekukannya 16 bank nasional. Setelah itu beberapa kasus perbankan diajukan ke kejaksaan dengan tuduhan tindak pidana dengan tuduhan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, laporan keuangan ganda, manipulasi saham, dan pelanggaran peraturan perbankan serta adanya bank yang diduga melakukan praktik perekeyasaan laba. (Suara Merdeka, 2004b).

Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai laporan keuangan perbankan. Padahal kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting yang mendukung pengembangan dan operasional perbankan. Perbankan perlu menjaga kepercayaan masyarakat karena pertumbuhan simpanan masyarakat merupakan bentuk kepercayaan bahwa dananya dikelola dengan baik dan memberikan sejumlah tambahan nilai uang dari bunga.

Penelitian mengenai determinan perekeyasaan laba di lingkungan perbankan belum banyak dilakukan. Sebagian besar menguji penggunaan provisi kerugian pinjaman (*loan-loss provisions*) sebagai instrumen perekeyasaan.

Bukti-bukti empiris dari penelitian terdahulu menunjukkan penggunaan provisi kerugian pinjaman (PKP) untuk melakukan perekrasan laba. Wahlen (1994), Collins dkk. (1995), dan Kanagaretnam dan Lobo (2000) menemukan bukti penggunaan provisi kerugian pinjaman untuk memanipulasi penghasilan. Sedangkan Moyer (1990), Beatty dkk (1995) serta Ahmed dkk (1999) tidak menemukan bukti penggunaan provisi kerugian pinjaman sebagai instrumen perekrasan laba di bank.

Bhat (1996) menunjukkan bahwa bank menggunakan provisi kerugian pinjaman untuk memanipulasi penghasilan. Determinan untuk melakukan perekrasan laba lebih nampak pada bank yang mempunyai pertumbuhan yang rendah, rasio asset terhadap nilai buku (*book-to-asset*) rendah, rasio simpanan terhadap pinjaman (*loans-to-deposit*) tinggi, rasio asset terhadap utang tinggi, rasio nilai buku terhadap nilai pasar rendah, rasio kembalikan asset rendah, rasio provisi kerugian pinjaman terhadap pinjaman tinggi dan asset yang lebih kecil.

Kanagaretnam dkk. (2000) mengungkapkan bahwa undervaluation memainkan peran penting bagi manajer bank untuk menggunakan provisi kerugian pinjaman diskresionari sebagai sinyal informasi mengenai kinerja bank di masa depan. Bukti yang lain menunjukkan bahwa derajat kinerja sekarang terhadap median industri merupakan penentu keputusan untuk melakukan perekrasan laba.

Ryan dan Liu (2006) menemukan bahwa selama periode 1990an ketika mengalami lonjakan keuntungan, bank-bank banyak melakukan upaya menurunkan laba yang dilaporkan dengan mempercepat provisi kerugian. Bank-bank profitabel banyak yang mengaburkan praktik perekrasan laba dengan mempercepat pembebanan pinjaman. Setelah tiga periode praktik tersebut, mereka memperoleh

laba persisten yang lebih tinggi dan lebih banyak di banding periode sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan determinan perekrasan laba menunjukkan ketidakkonsistenan hasil baik signifikansi atau pun arah hubungan. (Moses, 1987; DeFond dan Jiambalvo, 1994; Yermack, 1996; Ashari dkk., 1994; Fern dkk., 1994; Francis dkk., 1999; Kirschenheiter dan Melumad, 2002; Chung dkk., 2003; Makaryanawati, 2003; I Xie dkk., 2003; Kamarudin dkk., 2003; Zhang dkk., 2004; ñiguez dan Poveda, 2004; Atik dan Sensoy, 2004; Glaum dkk., 2004; Dey, 2004; Siregar dan Utama, 2005; Nikmah dan Suranta, 2005; Sarkar dkk., 2006; Iqbal dkk., 2006; Boediono, 2005; Kustono, 2008).

Perekrasan laba seringkali dipandang sebagai upaya penyilapan informasi keuangan yang sebenarnya. Dalam perspektif teori agensi, salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan ketanggungjelasan pengelolaan perbankan adalah dengan mekanisme tata kelola korporat yang baik.

Tata kelola korporat yang baik adalah mekanisme pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan, termasuk para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajer, Karyawan dan stakeholders lainnya. Pada tahun 2006 Bank Indonesia menerbitkan peraturan mengenai pelaksanaan tata kelola korporat yang baik bagi Bank Umum Peraturan ini mengharuskan industri perbankan menerapkan tata kelola korporat yang baik dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Beberapa penelitian tentang pengaruh tata kelola korporat yang baik dengan perekrasan laba menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Kepemilikan manajerial

(Warfield dkk., 1995; Gabrielsen dkk., 1997; kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit (Wedari 2004; Atmadja, 2005; Darmawati, 2003) belum menunjukkan pengaruh yang konsisten terhadap perekrutan laba.

Perumusan Masalah

Manajer bank mempunyai dorongan untuk melakukan perekrutan laba untuk mengurangi variabilitas laba. Dengan mengurangi variabilitas laba, manajer bank dapat mengurangi risiko disebabkan variabilitas laba merupakan salah satu indikator risiko. Untuk merekrut laba, manajer bank melakukan tindakan untuk meningkatkan laba ketika laba aktual adalah rendah, dan menurunkan laba ketika laba aktualnya tinggi.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah mekanisme tata kelola korporat yang baik (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite audit berpengaruh terhadap perekrutan laba perbankan publik di Indonesia?

Pengembangan Hipotesis

Teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa perusahaan dapat ditunjukkan sebagai a nexus of contracts pemilik sumber daya. Hubungan agensi dapat muncul ketika satu atau beberapa individual, mempercayakan pada satu atau beberapa individual, untuk melakukan beberapa tindakan dan kemudian medelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan agensi terjadi ketika tindakan satu individual mempengaruhi kesejahteraannya dan individual lainnya. Individual yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai agen dan pihak yang memiliki kesejahteraan

(*utilitas*) yang diukur dengan ukuran rupiah, dan dipengaruhi oleh tindakan agen disebut sebagai principal. Dalam hubungan agensi principal menginginkan agen bertindak sesuai kepentingan principal. Akan tetapi, agen diekspektasi memiliki kepentingan sendiri dan konsekuensinya, ia mungkin tidak bertindak sesuai kepentingan principal yang terbaik.

Hubungan agensi dalam bisnis biasanya tersusun atas dua bentuk hubungan yakni antara (1) pemegang saham dan manajer dan (2) antara pemberi hutang dan pemegang saham. Hubungan-hubungan ini seringkali tidak harmonis, yang oleh teori agensi disebut sebagai konflik agensi, atau konflik kepentingan antara agen dan principal.

Hal ini memiliki implikasi antara lain pada tata kelola korporat dan etika bisnis. Ketika agensi terjadi ini cenderung memunculkan biaya agensi, biaya yang dibebankan untuk menjaga hubungan agensi yang efektif (misalnya manajemen yang diberikan bonus untuk kinerja yang dilakukan dengan harapan untuk mendorong manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi: agen mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi, dan tujuannya yang sesungguhnya, yang berpotensi menciptakan *moral hazard* dan *adverse selection*. Prinsipal sendiri harus mengeluarkan biaya untuk memonitor kinerja agen dan menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien (Petrie, 2002).

Agen seseorang yang diekspektasi untuk bertindak dalam kepentingan terbaik prinsipal, mungkin mengutamakan kepentingan pribadinya dan mengurangi kesejahteraan prinsipal. Agen lebih banyak mengetahui informasi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang

dibandingkan prinsipal. Ketidaksamaan kepemilikan informasi menimbulkan kondisi asimetri informasi.

Perekayasaan laba

Laba merupakan ukuran yang seringkali digunakan untuk menentukan kinerja perusahaan. Laba (*earning*) dan penghasilan (*income*) merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pengguna laporan keuangan. Ball dan Brown (1968) menemukan bahwa informasi yang terkandung dalam angka akuntansi adalah berguna jika laba yang sesungguhnya berbeda dengan laba ekspektasian. Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, dan menaksir risiko dalam investasi atau meminjamkan dana (Dwiatmini dan Nurkholis 2001).

Perekayasaan laba diduga muncul atau dilakukan oleh manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan.

Perekayasaan laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, perekayasaan laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na'im, 2000).

Hand (1989) menganggap manajer melakukan perekayasaan laba untuk mengarahkan hasil dengan ekspektasi pasar, dan meningkatkan persistensi laba. Jika laba diratakan untuk mengurangi efek transitori arus kas dan menyesuaikan laba yang dilaporkan agar lebih stabil, menu-

rutnya perekayasaan laba akan dapat meningkatkan relevansi laba. Sementara Subramanyan (1996) menyimpulkan bahwa akrual dikresionari diapresiasi oleh pasar dan bahwa terdapat bukti perekayasaan laba memperbaiki persistensi laba. Magnan dan Cormier (1997) menyatakan bahwa praktik perekayasaan laba didorong oleh keinginan manajemen meminimisasi kos politis, maksimisasi kesejahteraan manajer, dan minimisasi biaya pendanaan.

Perekayasaan laba dapat digunakan untuk menampilkan profil laba perusahaan yang kuat dan stabil. Investor dan kreditur lebih menginginkan untuk menanam atau meminjamkan dananya kepada perusahaan yang kelihatan kuat. Pemasok juga lebih menyukai bekerja sama dengan perusahaan semacam ini sebab mereka berharap pembayarannya dapat tepat waktu dan perusahaan akan dapat melakukan pembelian secara berlanjut. Pekerja juga akan merasa lebih tenang dan bersemangat bekerja sebab mereka berpikir perusahaan akan hidup terus dan karenanya memperoleh keamanan kerja (*job security*) yang lebih tinggi (Atik dan Sensoy, 2005).

Tata kelola korporat yang baik secara substansial adalah pengelolaan bisnis dengan mendasarkan pada kepentingan stakeholders dengan cara menggunakan sumber daya secara efisien, transparansi dan akuntabel. Tata kelola korporat yang baik dikembangkan berlandaskan perspektif keseimbangan antara entitas dan stakeholders.

Tata kelola korporat yang baik sangat penting untuk diterapkan karena peta persaingan usaha yang semakin kompetitif dan perubahan struktur kepemilikan entitas bisnis yang kompleks. Perubahan struktur kepemilikan tersebut seringkali dicerminkan atau mengakibatkan adanya

kekeliruan laporan akuntansi, namun demikian sering terjadi perbedaan opini antara manajemen dan auditor dalam mengaplikasikan pabu secara benar. DeFond dan Subramanyam (1998) menyatakan bahwa risiko adanya litigasi mendorong auditor untuk lebih menyukai pilihan akuntansi yang lebih konservatif dibanding manajemen. Magee dan Tseng (1990), Dye (1991), serta Antle dan Nalebuff (1991) menyatakan bahwa karena alasan perbedaan tersebut auditor dipecat. Kemungkinan yang lain adalah informasi yang tersaji dalam laporan keuangan adalah informasi yang dinegoisasikan. Nelson dkk. (2000), mengkonfirmasi bahwa banyak angka - angka laba laporan adalah hasil dari proses negoisasi.

Klein (2002) menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap tindakan

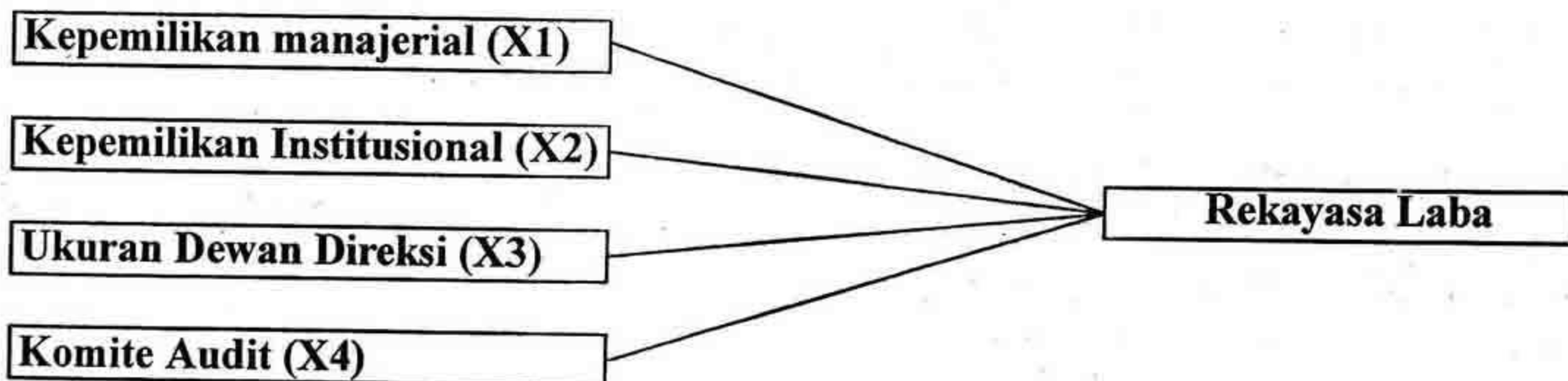
berkaitan dengan manajemen laba. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan negatif antara komite audit independen dengan akrual abnormal. Penurunan jumlah anggota komite audit mendorong peningkatan akrual abnormal. Studi ini menyimpulkan bahwa adanya komite audit efektif dalam memantau proses akuntansi keuangan. Wedari (2004) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap perekayasaan laba.

Demikian pula dengan studi Atmadja (2005). Penelitian yang dilakukan pada 60 perusahaan manufaktur publik di Indonesia memperlihatkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap praktik perekayasaan laba.

Hipotesis empat yang diusulkan adalah komite audit berpengaruh terhadap perekayasaan laba.

Model Penelitian

Adapun model penelitian ini adalah sebagai berikut:



Model persamaan regresi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y = Perekayasaan laba

a = Konstanta

b1 = Koefisien regresi variabel X1,

b2 = Koefisien regresi variabel X2

b3= Koefisien regresi variabel X3

b4= Koefisien regresi variabel X4

X1 = Kepemilikan Manajerial

X2 = Kepemilikan Institusional

X3 = Dewan Direksi

X4 = Komite Audit

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen penelitian ini adalah perekayasaan laba (Y). Variabel independennya adalah kepemilikan institusional (X1), kepemilikan manajerial (X2), (X2), ukuran dewan direksi (X3), dan komite audit (X4).

Kepemilikan Manajerial (X1)

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham yang juga bertindak sebagai

Kepemilikan Institusional dan Perekayasaan Laba

Suatu organisasi yang biasanya dikelompokkan sebagai investor institusional adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, lembaga keuangan, perusahaan investasi, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lain yang dapat dikategorikan sebagai institusi.

Investor institusional adalah investor besar yang memiliki pengalaman lebih dalam investasi (Lang dan McNichols, 1997; Koh, 2001). Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme tata kelola korporat yang baik. Institusi mempunyai sumber, kemampuan, dan kesempatan untuk memonitor dan mendisiplinkan manajer untuk tetap fokus pada tujuan perusahaan jangka panjang. Kepemilikan institusional umumnya akan bertindak sebagai pihak yang memantau aktivitas perusahaan (Faizal, 2004). Perusahaan dengan kepemilikan yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.

Rajgopal dkk., (2001) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki implikasi terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional yang semakin tinggi akan memainkan peranan penting dalam pemantauan operasional perusahaan. Mereka menemukan hubungan yang negatif antara kepemilikan institusional dengan akrual diskresionari. Mereka menyimpulkan bahwa manajer akan sulit melakukan manipulasi penghasilan selama pemilik institusional melakukan tekanan dan pengawasan.

Perubahan perilaku investor institusional dari pasif menjadi pengawas aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajer sehingga dalam mengambil keputusan yang bersifat oportunistik, manajer lebih mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya (Atmadja, 2005) Dengan kepemilikan

saham yang signifikan oleh investor institusional telah meningkatkan aktivitas dalam melakukan pengawasan.

Kepemilikan institusional yang semakin besar dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kepemilikan tersebut juga mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen (Wahidahwati, 2002).

Koh (2002) menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap motivasi rekayasa laba. Koh berhasil menemukan bukti ada pola hubungan yang negatif antara level kepemilikan institusional terhadap praktik perekayasaan laba.

Hipotesis satu yang diusulkan adalah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap perekayasaan laba.

Kepemilikan Manajerial dan Perekayasaan Laba

Carlson dan Bathala (1997) dan Beattie, dkk., (1994) berpendapat bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap praktik perekayasaan laba. Motivasi mereka adalah bahwa mereka memperoleh manfaat langsung dari peningkatan harga saham melalui perekayasaan laba dan ini mengindikasikan adanya asosiasi yang positif. Warfield, Wild dan Wild (1995) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial positif berkorelasi dengan akrual akuntansi diskresionari (*discretionary accounting accruals*).

Dalam konteks manajemen laba Dhaliwal, Salamon, dan Smith (1982) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan manipulasi laba. Weisbach (1988) memperluas penelitian dan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang lebih banyak cenderung akan memiliki jumlah outside dan komite audit yang lebih kecil

Peasnell dkk. (2000), menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang lebih kecil akan memiliki proporsi *outside* yang lebih besar. Mereka menemukan bahwa *outside director* berperan penting dalam membatasi manajer untuk memanipulasi laba ketika kepemilikan manajerialnya rendah. Teori agensi juga menyatakan bahwa salah satu pemicu untuk melakukan manajemen laba adalah level kepemilikan manajerial.

Pandangan lain menyatakan bahwa pada kepemilikan manajerial yang semakin besar, insentif untuk menggeser kesejahteraan menjadi lebih rendah. Hal ini menyatakan adanya asosiasi negatif antara perekayasaan dan tingkat kepemilikan manajerial (Beattie, dkk., 1994). Dalam konteks manajemen laba Dhaliwal dkk. (1982) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berasosiasi negatif dengan manipulasi penghasilan. Weisbach (1988) menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan manajerial yang lebih tinggi akan menurunkan kemungkinan adanya praktik perekayasaan laba.

Ma (1988) menunjukkan bahwa derajat pengendalian akan mempengaruhi manajer untuk melakukan perilaku perekayasaan. Berbagai studi yang dilakukan (Monsen, Chiu dan Cooley, 1968; Lerner, 1971; Koch, 1981; Amihud dkk., 1983 dalam Stolowy dan Breton, 2000) menyediakan bukti bahwa manajemen yang mengendalikan menunjukkan relatif memiliki serial penghasilan yang lebih rata dan memiliki risiko pasar sistematis yang lebih rendah dibandingkan pemilik mengendalikan perusahaan.

Makaryanawati (2003) menemukan adanya hubungan yang monotonik antara nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan interaksi variabel perekayasaan laba dengan kepemilikan manajerial

terhadap nilai perusahaan. Ini berarti bahwa semakin rendah kepemilikan manajerial maka akan semakin tinggi motivasi manajemen untuk melakukan praktik perekayasaan laba.

Midiastuty dan Machfoedz (2003) melakukan penelitian pengujian terhadap pengaruh mekanisme tata kelola korporat yang baik terhadap perekayasaan laba yang diproaksikan dengan akrual diskresionari. Studi ini menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap akrual diskresionari. Demikian pula dengan studi Fidyati (2004). Hasil studinya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai hubungan negatif dengan perekayasaan laba. Pada level kepemilikan saham oleh manajer relatif sedikit maka manajer lebih cenderung melakukan praktik perekayasaan. Hal ini disebabkan manajer melakukan penjarangan kepentingan manajer dengan *shareholder*.

Berbeda dengan studi-studi di atas, Koh (2002) gagal menunjukkan adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik perekayasaan laba. Kepemilikan manajerial bukan determinan perekayasaan laba.

Hipotesis dua yang diusulkan adalah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap perekayasaan laba.

Dewan Komisaris Dan Perekayasaan Laba

International Monetary Fund (IMF) menyarankan kepada pemerintah Indonesia sebagai salah satu instrumen *recovery economy* untuk menerapkan tata kelola korporat yang baik. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Beberapa pihak menyatakan bahwa penyebab krisis ekonomi Indonesia, adalah (1) mekanisme pengawasan

dewan komisaris dan komite audit suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif dan kinerja perusahaan meningkat dengan adanya komisaris independen (Brickley dkk., 1994; Byrd dan Hickman, 1992; Weisbach, 1988). Penelitian lainnya mendukung bahwa ada hubungan negatif antara komisaris dari luar dengan kesalahan pelaporan keuangan. Dechow dkk. (1996) dan Beasley (1996) menguji perusahaan yang melakukan penyimpangan terhadap pabu dan memiliki system pelaporan keuangan yang curang. Kedua studi tersebut mengimplikasikan bahwa proporsi komisaris independen dapat berasosiasi dengan kualitas sistem keuangan perusahaan.

Lebih lanjut dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen (Chtourou dkk., 2001).

Peasnell dkk (2000) memperluas literatur dengan menguji hubungan antara peran monitoring dewan komisaris dan manajemen laba. Mereka menguji hipotesis bahwa monitoring yang efektif seharusnya membatasi manipulasi laba yang berdampak mahal bagi pemilik perusahaan.

Sercu dkk (2002) menyediakan bukti peran ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Semakin besar dewan komisaris akan membatasi praktik manajemen laba.

Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Beasley (1996) dan Abbotts dkk. (2000). Mereka menguji apakah ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan yang

positif dengan kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian tersebut tidak menemukan hubungan antara kedua hal tersebut, karena semakin besar dewan direktur semakin tidak efisien dan semakin lemah kontrolnya terhadap manajemen.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris memberikan hasil yang tidak konsisten. Klein (2002), Chtourou dkk. (2001) memperlihatkan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris semakin efektif pengawasan yang dilakukan. Namun hasil berbeda diungkapkan oleh Beasley (1994), dan Abbotts dkk. (2000). Menurut mereka jumlah yang besar akan menyebabkan inefektifitas. Hal ini memunculkan dugaan bahwa komposisi yang efektif dari dewan komisaris adalah dalam bentuk kurva.

Hipotesis tiga yang diusulkan adalah komisaris independen berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan perekayasaan laba.

Komite Audit Dewan Komisaris Dan Perekayasaan Laba

Komite audit menurut adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus (Wedari, 2004). Manfaat komite audit yang dibentuk sebagai sebuah komite khusus di perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya merupakan tanggung jawab penuh dari dewan komisaris.

Tugas komite audit adalah mengendalikankan proses pelaporan keuangan. Hal ini dengan berkaitan dengan praktik auditor perusahaan dan manajer keuangan internal untuk mereview laporan keuangan perusahaan, proses audit dan pengendalian akuntansi internal. Meskipun keberadaan komite audit berperan dalam menjaga

manajer, pelaksana kegiatan operasional dan secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial ini diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajerial.

Kepemilikan Institusional (X2)

Kepemilikan Institusional menunjukkan persentase saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan *blackholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas 5%, tetapi tidak termasuk kedalam golongan kepemilikan insider. Kepemilikan oleh *blackholder* dimasukkan kedalam kepemilikan institusi.

Dewan komisaris (X3).

Mengikuti Chtourou dkk. (2001), dewan komisaris dibedakan menjadi dewan dengan anggota lebih besar atau lebih kecil dari 7 orang.

Komite Audit (X4)

Komite Audit ditentukan apakah suatu perusahaan sudah memiliki komite audit. Variabel ini merupakan dummy, yaitu dengan menggunakan skala 1 untuk perusahaan yang memiliki komite audit dan skala 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki komite audit.

Perekayaan laba (Y)

Perekayaan laba merupakan suatu bentuk intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan mereka sendiri. Perekayaan laba diproaksikan oleh aktual diskresionari yang dideteksi dengan model aktual khusus Beaver dan Engel (1996). Model tersebut dituliskan sebagai berikut:

$$NDAit = \beta_0 + \beta_1 COit + \beta_2 LOANit + \beta_3 NPAit + \beta_4 \Delta NPAit+1 + \epsilon it \quad (1)$$

Dimana:

COit : *loan charge offs*

LOANit : *loans outstanding*

NPAit : *non performing assets*

(aktiva produktif yang bermasalah), terdiri dari aktiva produktif yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya digolongkan menjadi (a) dalam perhatian khusus, (b) kurang lancar, (c) diragukan, dan (d) macet

$\Delta NPAit+1$: selisih non performing assets t+1 dengan *non performing assets t*
NDAit : aktual non diskresionari.

Sesuai dengan definisinya bahwa:

$$TAit = NDAit + DAit \quad (2)$$

Dimana:

DAit adalah aktual diskresionari, TAit adalah total aktual, dan NDAit adalah aktual non diskresionari, maka:

$$TAit = \beta_0 + \beta_1 COit + \beta_2 LOANit + \beta_3 NPAit + \beta_4 \Delta NPAit+1 + Zit \quad (3)$$

$$\text{Dimana } Zit = DAit + \epsilon it \quad (4)$$

Untuk menentukan aktual total dengan menggunakan model Beaver dan Engel (1996) ini maka digunakan total saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif. Dalam penentuan koefisien perekayaan laba tersebut semua variabel dideflasi terlebih dahulu dengan nilai buku ekuitas dan cadangan kerugian pinjaman.

Hasil Dan Pembahasan

Sampel

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdaftar mulai tahun 2004 sampai dengan 2006. Sampel yang di dalam penelitian ini sebanyak 23 bank yang tergolong dalam kategori bank devisa dan non devisa.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif menggambarkan profil data sampel yang dapat digunakan

untuk mengamati kecenderungan data sampel. Hasilnya menunjukkan seperti

tampak pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Rerata	Std. Deviasi	Nilai Maks	Nilai Min
Kepemilikan Institusional	25,0435	4,2797	35,00	18,00
Kepemilikan Manajerial	0,6448	0,0082	0,75	0,40
Perekayasaan laba	11,4579	1,3149	14,71	9,25

Tabel 1 menunjukkan sampel memiliki distribusi nilai rata-rata variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan perekayasaan laba sebesar 25,0435; 0,64448 dan 11,4579. Standar deviasi adalah kepemilikan intitusional 4,2797 dan dan kepemilikan manajerial sebesar 0,0082. Perekayasaan laba nilai standar deviasinya sebesar 1,3149.

Dari statistik deskriptif juga diketahui bahwa komposisi dewan komisaris bank-bank di BEI adalah 4 bank (17,4%) memiliki komisaris lebih dari 7 orang dan 82,6% sisanya (19 bank) memiliki jumlah dewan komisaris kurang dari 7 orang. Bank yang belum memberikan pengungkapan keberadaan komite audit sejumlah 7 bank (30,4%) dan 69,6% sisanya (16 bank) sudah menyampaikan informasi adanya komite audit.

Pengujian Hipotesis

Pengujian regresi dilakukan untuk mengujia pengaruh variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi dan komite audit terhadap perekayasaan laba pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2004-2006.

Uji Statistik F

Pengujian dengan menggunakan statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model memiliki variansi pengaruh terhadap variabel

dependen independen. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa nilai signfikasi statistik F adalah 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat variansi pengaruh pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji statistik T

Pengujian statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit terhadap variabel dependen yaitu perekayasaan laba. Hasilnya tampak pada tabel 2

Tabel 2. Hasil Pengujian

Variabel Penelitian	t-hitung	P value
Kepemilikan Manajerial	5,310	0,000
Kepemilikan Institusional	2,753	0,013
Dewan Direksi	-3,635	0,002
Komite Audit	-2,391	0,028

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki p value = 0,000. Dapat diartikan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu perekayasaan laba. Variabel kepemilikan manajerial menunjukkan p valuenya adalah = 0,013. Dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional terhadap variabel dependen yaitu perekayasaan laba. Variabel dewan komisaris menunjukkan p value = 0,002. Dapat

diartikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap perekayasaan laba.

Pembahasan

Pengujian kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komite audit terhadap variabel perekayasaan laba menunjukkan bahwa masing-masing variabel tersebut berpengaruh terhadap tindakan perekayasaan laba.

Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tindakan perekayasaan laba. Hal ini selaras dengan studi Midiastuty dan Machfoedz (2003) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negatif dan signifikan dengan perekayasaan laba. Hasil penelitian ini menunjukkan arah yang berlawanan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wedari (2004). Wedari (2004) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan positif dan signifikan terhadap perekayasaan laba.

Variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan perekayasaan laba. Hasil studi ini memperkuat studi Rajgofao et al (1999) yang menemukan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dengan perekayasaan laba. Pemilik institusional mencegah terjadinya praktik perekayasaan laba. Investor institusional secara efektif melakukan mekanisme pemantauan untuk menghindarkan laporan keuangan yang direkayasa.

Variabel dewan komisaris menunjukkan pengaruh terhadap perekayasaan laba. Hasil penelitian ini selaras dengan studi Midiastuty dan Machfoez (2003). Studi mereka menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perekayasaan laba.

Variabel komite audit berpengaruh terhadap perekayasaan laba. Hasil ini mendukung studi Atmadja (2005) yang

menyimpulkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh terhadap perekayasaan laba. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite audit dapat menurunkan praktik perekayasaan laba.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Mekanisme tata kelola korporat yang baik yakni adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan komite audit terbukti dapat menurunkan praktik perekayasaan laba pada perusahaan perbankan di Indonesia. Hal ini selaras dengan simpulan studi dilakukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003).

Hipotesis satu menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan perekayasaan laba. Hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap perekayasaan laba. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis null satu dapat ditolak.

Hipotesis dua menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tindakan perekayasaan laba. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negatif dan signifikan dengan perekayasaan laba. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis null dua dapat ditolak..

Hipotesis tiga menyatakan bahwa variabel dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan perekayasaan laba. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap tindakan perekayasaan laba. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis null tiga dapat ditolak.

Hipotesis empat menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tindakan perekayasaan laba. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh terhadap tindakan perekayasaan laba.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh terhadap perekayasaan laba. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis null empat dapat ditolak.

Saran

Studi ini gagal untuk menemukan beberapa informasi yang dibutuhkan semisal keberadaan komite audit pada beberapa bank. Informasi tersebut tidak seluruhnya dapat diperoleh dari laporan keuangan maupun laporan tahunan. Hal ini menyebabkan kemungkinan adanya perbedaan simpulan dengan kondisi empiris. Penelitian mendatang dapat memperbaiki studi ini dengan mendetailkan informasi mengenai keberadaan komite audit.

Pengukuran keberadaan komite audit dan ukuran dewan komisaris menggunakan variabel dummy menghilangkan nuansa yang terjadi karena perbedaan jumlah orang perorang. Simpulan penelitian ini hanya menyandarkan pada keberadaan komite audit dan besar kecilnya ukuran dewan komisaris. Penelitian mendatang sebaiknya mempertimbangkan hal ini.

Penelitian ini tidak mendeteksi karakteristik kepemilikan perusahaan, sehingga tidak menjangkau dominasi mayoritas, dominasi pendiri, dominasi perusahaan induk. Penelitian mendatang dapat dilakukan dengan mengukur dominasi-dominasi tersebut untuk menghindarkan dari salah simpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, L.J., S. Parker, and G.F. Parker. 2002. Audit committee characteristic and financial misstatement: a study of the efficacy of certain Blue Ribbon Committee recommendation. *www.ssrn.com*.
- Ahmed, A.S., C. Takeda dan S. Thomas, 1999. Bank loan loss provisions: A reexamination of capital management, earnings management and signaling effects. *Journal of Accounting and Economics* 28(1) (November): 1-25.
- Ashari, N., H.C. Koh, S.L. Tan. dan W.H. Wong. 1994. Factors Affecting Income Smoothing Among Listed Companies in Singapore. *Accounting and Business Research*. Vol. 24, No. 96: 291-301
- Atik, A. dan N. Şensoy. 2006. Detecting income smoothing behaviours of Turkish listed firms through discretionary accounting changes. *Sosial Science Research Network*
- Ball, R., Brown, P., 1968. An empirical evaluation of accounting income numbers. *Journal of Accounting Research* 6: 159-178.
- Beasley, M.S., dan Steven E.S. 2001. The relationship between board characteristic and voluntary improvement in audit committee composition and experience. *Contemporary Accounting Research*, 18 (Winter): 539-570
- Beattie, V., S. Brown, D. Ewers, B. John, S. Manson, D. Thomas dan M. Turner. 1994. Extraordinary items and income smoothing: A positive accounting approach. *Journal of Business Finance dan Accounting*, 216: 0306-686X
- Beatty, A., S.L. Chamberlain dan J. Magliolo, 1995. Managing financial reports of commercial banks: The influence of taxes, regulatory capital, and earnings. *Journal of Accounting Research* 33 (Autumn): 231-261
- Bhat V. N., 1996. Banks and income smoothing: an empirical analysis. *Applied Financial Economics*, Volume 6, No.6, (December): 505-510
- Boediono, G S. B. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisa Jalur. *Makalah*. Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Byrd, J.W., and K.A. Hickman. 1992. Do outsider directors monitor managers? *Journal of Financial Economics* 19: 589-606.
- Carlson, S.J. dan C.T. Bathala., 1997. Ownership differences and firms' income smoothing behavior. *Journal of Business Finance & Accounting* 24(2) (March): 179-196.
- Chung, R., M. Firth dan J.B Kim. 2002. Institutional monitoring and opportunistic earnings management. *Journal of Corporate Finance* 8: 29-48
- Collins, J., Shackelford, D., dan Wahlen, J., 1995. Bank differences in the coordination of regulatory capital, earnings and taxes. *Journal of Accounting Research* 33 (2), 263-292.
- Dechow, P., R. Sloan dan A. Sweeney, 1995. Detecting earnings management. *The Accounting Review* 70(2): 193-225
- DeFond, M.L. dan J. Jiambalvo, 1994. Debt covenant violations and manipulation of accruals. *Journal of Accounting and Economics* 17: 145-176.
- Dey, A. 2004. Income smoothing and sophisticated investor preferences. *Social Science Research Network Electronic Paper*: id571541
- Dhaliwal, D. S., G. L., Salamon, dan E. D. Smith, 1982. The effect of owner versus management control on the choice of accounting methods. *Journal of Accounting and Economics* 4. 41-53.

- income smoothing*: The experience in the US banking industry. *Journal of Business Finance and Accounting* 15 (4) (Winter): 487-497.
- Magnan, M. dan D. Cormier., 1997. The impact of forward-looking financial data in IPOs on the quality of financial reporting. *Journal of Financial Statement Analysis*, Spring, 6-17.
- Makaryanawati, 2003. Analisis perbedaan praktek perataan penghasilan melalui ukuran perusahaan. *Ekuitas, Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Stiesia*. Vol 7 No.1, (Maret): 1-15
- Moses, O.D. 1987. Income Smoothing and Incentives: Empirical Test Using Accounting Changes. *The Accounting Review* 62 (2): 358-377.
- Rajgopal, S., M. Venkatachalam dan J. Jambalvo, 2001. Is institutional ownership associated with *earnings* management and the extent to which stock prices reflect future *earnings*? *Working Paper*.
- Ryan, Stephen G, dan Chi-Chun Liu. 2006. *Income smoothing* over the business cycle: changes in banks coordinated management of provisions for loan losses and loan charge-offs from the Pre-1990 bust to the 1990s boom. *Accounting Review*, (March): 43-61
- Sarkar, J., S. Sarkar. dan K. Sen. 2006. Board of Directors and Opportunistic *Earnings* Management: Evidence from India. *Sosial Science Research Network*.
- Subramanyam, K. R. 1996. The pricing of discretionary accruals. *Journal of Accounting and Economics*, 22: 249-281.
- Wahlen, J.M., 1994. The nature of information in commercial bank loan loss disclosures. *The Accounting Review* (July): 455-478
- Warfield T. dan T.J. Linsmeir, 1992. Tax planning, *earnings* management, and the differential information content of bank *earnings* components. *The Accounting Review* 67(3): 546-562.
- Weisbach, M.S., 1988. Outside directors and CEO turnover. *Journal of Financial Economics* 20, 198-431.
- Xie, B., W.N. Davidson III dan P.J. DaDalt. 2003. *Earnings* management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. *Journal of Corporate*
- Zhang, Y, D.R. Deis, P. Huang, and J.S. Moffitt. 2004. *Earnings* smoothing choice, firm value and corporate monitoring. www.SSRN.com.